



# Warga Buru Mitan Bersubsidi

10 November  
Dihapus, Per Liter  
Jadi Rp 7.132

**JOGJA** - Antrean minyak tanah (mitan) kembali terlihat di agen-agen resmi penyalur bahan bakar ini di Jogja kemarin. Warga berburu mitan bersubsidi, sebelum pemberian subsidi dihentikan 10 November mendatang.

Dengan berakhirnya pengalokasian subsidi di wilayah DIJ, maka mitan yang akan beredar di pasaran adalah mitan nonsubsidi atau minyak tanah keekonomian. Dengan begitu, harga yang dijual ke masyarakat akan naik menjadi Rp 7.132 per liter.

Pemberhentian pengalokasian subsidi mitan ini dikhawatirkan turut menjadi salah satu faktor pemicu laju inflasi di Jogja. Hingga Oktober ini, inflasi yang terjadi di kota ini sudah mendekati double digit 9,92-

persen dan inflasi tahunan 10,77 persen.

Hal ini perlu diwaspadai mengingat bulan-bulan ke depan masih banyak kalender aktifitas keagamaan yang dapat memicu naiknya harga-harga di pasaran, yang diakibatkan banyaknya faktor permintaan di masyarakat.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Pertanian Provinsi DIJ, Dinas Perhubungan DIJ, Bulog, BPS, Polda DIJ, Disnakertrans, Bapeda, Pertamina, dan Bank Indonesia kemarin bertemu dalam rapat koordinasi TPID. Mereka membahas sosialisasi mengenai berakhirnya masa pengalokasian minyak tanah bersubsidi wilayah DIJ ini.

Pemimpin BI Tjahjo Oetomo mengatakan, rencana penghilangan subsidi minyak tanah ini dapat disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat dapat bersiap-siap menghadapi hal ini ■

► Baca *Pemkot...* Hal 13

# Antisipasi Penyelewengan, Ada Pewarnaan

## WARGA

Sambungan dari hal 3

"Masyarakat bisa mulai menggunakan gas atau bahan bakar lain yang lebih murah. Dengan demikian, kepanikan masyarakat dapat direduksi, dan potensi tekanan inflasi dapat diminimalisasi," tuturnya, di hadapan tim koordinasi dan wartawan yang hadir dalam pertemuan di Ruang Rapat Besar BI Jogja, kemarin.

TPID telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan itu. Di antaranya Pertamina yang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu berakhirnya masa subsidi minyak tanah di pasaran. Dengan demikian, TPID juga meminta konversi minyak tanah ke gas dapat dipercepat.

"Dalam hal ini distribusi tabung gas 3 kg di masyarakat

agar berjalan lancar," imbuh Tjahjo. TPID juga mengerahkan aparat keamanan untuk mengawasi proses konversi dan pendistribusian.

Jika konversi dapat dilakukan secara merata, Pertamina akan mengganti sepenuhnya mitan bersubsidi dengan elpiji 3 kg bersubsidi. Untuk itu, Pertamina akan meningkatkan volume stok dan penyaluran elpiji 3 kg khususnya di Kota Jogja dan Kabupaten Sleman guna mengantisipasi lonjakan permintaan elpiji 3 kg.

"Di Sleman dan Kota Jogja, elpiji disuplai oleh dua SPPBE, yaitu PT Bakti Bunga Ananda dan PT Tunas Satriya Mandiri," papar Sales Area Manager Pertamina Jogja Arie Anggoro.

Penambahan SPPBE juga akan dilakukan di tiga lokasi di Jogja yaitu Rewulu, Bantul, dan Kulonprogo dengan kapasitas masing-masing 30 MT per hari

di tiap SPPBE. Selain itu, Pertamina juga akan mengintensifkan kesiapan agen dan pangkalan elpiji 3 kg, khususnya dalam ketersediaan bufferstock.

Koordinasi dengan Hiswana Migas untuk monitoring jalur pemasaran elpiji 3 kg, baik di agen dan pangkalan juga dilakukan. Selain sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pendidikan dan penggunaan elpiji 3 kg.

Meski demikian, Pertamina tetap akan menyediakan minyak tanah nonsubsidi bagi konsumen yang membutuhkan, seperti industri-industri yang menggantungkan hasil kualitas produksi dari proses pembakaran dengan minyak tanah. Untuk mereka, akan disediakan pangkalan-pangkalan tertentu.

"Harga minyak tanah non subsidi akan disesuaikan dengan harga minyak dunia mengacu

pada harga Mild Oil Platts Singapore (MOPS), dan harga tersebut akan mengalami perubahan per tanggal 1 dan 15 setiap bulannya," papar Arie.

Untuk wilayah Bantul dan Gunungkidul, saat ini sedang pada tahap pendistribusian paket perdana elpiji 3 kg dan sudah mengalami penarikan minyak tanah secara bertahap. Sedangkan wilayah Kulonprogo, masih dalam tahap pencahangan bagi penerima paket perdana konversi.

Untuk mengantisipasi penyelewengan minyak tanah bersubsidi dijual dengan harga nonsubsidi, dilakukan pewarnaan khusus terhadap minyak tanah. Pada minyak tanah non subsidi akan diberi zat adiktif khusus berwarna ungu. Sehingga, secara tampilan fisik dapat dibedakan secara jelas mana minyak tanah bersubsidi dan nonsubsidi. (cw7)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005